

**“Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)”**

**PEMBENTUKAN MODEL PENYUSUNAN PROGRAM KERJA MUSLIMAT NU  
BERBASIS ISU DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER DAERAH**

Oleh

Sofa Marwah, Soetji Lestari, Oktafiani Catur Pratiwi  
Universitas Jenderal Soedirman  
Email: sofamarwah75@gmail.com

**ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk membentuk model penyusunan program kerja Muslimat NU berbasis pada isu dan kebijakan pembangunan gender di daerah. Pembentukan model ini penting karena capaian pembangunan gender di daerah seperti Kabupaten Banyumas masih kurang. Sebagai organisasi perempuan yang memiliki anggota sangat banyak hingga pelosok, Muslimat NU memiliki potensi untuk mendukung peningkatan pembangunan gender di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian aksi yang berperspektif gender, yaitu menggabungkan orientasi gender dalam bentuk penelitian feminis aksi partisipatif (*Feminis Participatory Action Research – FPAR*) didukung teknik analisis Moser. Penelitian menghasilkan sebuah model penyusunan program kerja Muslimat NU yang selaras dengan isu dan kebijakan pembangunan gender di daerah. Model tersebut juga dilengkapi dengan strategi pelaksanaan model penyusunan program kerja agar Muslimat NU memiliki kontribusi dalam capaian pembangunan gender di daerah yang masih kurang, seperti di Kabupaten Banyumas.

**Kata kunci:** program kerja, Muslimat NU, pembangunan, gender

**ABSTRACT**

*This paper aims to establish a model of Muslimat NU activity programs based on gender development issues and policies in the region. The formation of this model is important because gender development achievements in areas such as Banyumas Regency are still lacking. As a women's organization that has very many members in remote areas, Muslimat NU has the potential to support increased gender development in Banyumas Regency. This research is an action research with a gender perspective, which combines gender orientation in participatory action research (Feminist Participatory Action Research - FPAR) supported by Moser's analysis technique. The study created a model for the preparation of Muslimat NU activity programs that aligned with gender development issues and policies in the region. The model is also complemented by the strategy of implementing the model, in order to Muslimat NU have a contribution in the achievement of gender development in areas that are still lacking as in Banyumas Regency.*

**Keywords :** activity programs, Muslimat NU, development, gender

## **PENDAHULUAN**

Muslimat NU merupakan organisasi perempuan yang memiliki potensi strategis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan berperspektif gender melalui program kerja yang dilakukan. Namun demikian program kerja Muslimat NU masih terkesan terpisah dengan permasalahan krusial yang menjadi fokus kebijakan pembangunan gender di daerah. Padahal, Muslimat NU Banyumas misalnya, memiliki keanggotaan yang tersebar sampai ke pelosok perdesaan dengan jumlah anggota yang sangat banyak, memiliki ikatan sosial kultural yang mendalam, ikhlas bekerja tanpa pamrih, serta intensitas program kerja yang cukup tinggi dari tingkat kepengurusan cabang (kabupaten), anak cabang (kecamatan), sampai ke ranting (desa). Khusus kepengurusan Muslimat NU Kabupaten Banyumas memiliki dua pengurus cabang, yaitu Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja. Hal tersebut terkait dengan kesejarahan masa lalu, di mana kepengurusan Muslimat NU Sokaraja terlibat dalam pendirian Muslimat NU nasional di Purwokerto (PP Muslimat NU, 1979). Untuk saat ini, Muslimat NU Banyumas membawahi 21 Anak Cabang dan Muslimat NU Sokaraja menaungi 6 Anak Cabang.

Adapun untuk Kabupaten Banyumas, capaian pembangunan gender masih belum memuaskan. Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banyumas 2015 di bawah Jawa Tengah dan Nasional. IPM Banyumas Tahun 2015 adalah 67,77; IPM Jawa Tengah adalah 69,49; IPM Nasional 69,55. Selanjutnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran kualitas sumber daya yang memperhatikan selisih perbedaan laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (fokus pada ketidaksetaraan). Pada Tahun 2015, IPG Banyumas di bawah IPG Jawa Tengah, yaitu IPG Banyumas adalah 86,66, IPG Jawa Tengah 92,21 dan IPG Nasional 91,03. Adapun IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) merupakan indikator yang melihat partisipasi dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam hal ini IDG Banyumas juga lebih rendah dari IDG Jawa Tengah dan Nasional (IDG Banyumas adalah 67,77; IDG Jawa Tengah 74,80; dan IDG Nasional 70,83) (KPPPGA, 2016). Kondisi demikian tentu merupakan “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memberikan prioritas pembangunan yang lebih sensitif gender, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar manusia

Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja di satu sisi, dan di sisi lain masalah capaian pembangunan gender yang belum

memuaskan di Kabupaten Banyumas, maka tulisan ini bertujuan membentuk model penyusunan program kerja Muslimat NU yang selaras dengan isu dan pembangunan gender di daerah. Diharapkan model tersebut dapat mendukung kontribusi perempuan Muslimat NU dalam pencapaian pembangunan yang berperspektif gender pada sektor-pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi-ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian aksi yang berperspektif gender, yaitu menggabungkan orientasi gender dalam bentuk penelitian feminis aksi partisipatif (*Feminis Participatory Action Research – FPAR*) (Saptari & Holzner, 1997: 497). Penetapan informan dipilih secara purposive, meliputi Pengurus Cabang dan Anak Cabang Muslimat NU Banyumas, Pengurus Cabang dan Anak Cabang Muslimat NU Sokaraja, serta SKPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsonakertrans, Disperindagkop. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kombinasi *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara (*interviewing*), studi dokumen (*reading*), dan observasi (*watching*) (Punch, 2006 : 52). Teknis analisis menggunakan analisis Moser yang membantu peneliti merumuskan dan mengevaluasi program yang lebih peka gender. Aplikasi analisis ini untuk penelitian yang dirancang untuk mengevaluasi suatu program atau proyek (Handayani & Sugiarti, 2002).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potensi Muslimat NU Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Masa Perempuan**

Muslimat NU didukung oleh sumber daya manusia yang sangat banyak dan didukung oleh ikatan sosial-kultural sebagai warga *nahdliyin* yang kuat. Ikatan sosial-kultural sebagai anggota Muslimat NU lebih kuat tanpa perlu dilabeli kepemilikan kartu anggota. Nilai dasar mereka adalah ingin memajukan kehidupan kaum perempuan agar bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat dan bangsa. Mereka adalah gambaran perempuan yang dengan ikhlas untuk menjalankan tugas, berbuat bagi sesama, membantu kepada siapa yang membutuhkan, meskipun mereka tidak pernah menerima gaji, bahkan tidak jarang pula justru harus membiayai kegiatan.

Dalam hal pendanaan, organisasi Muslimat NU adalah organisasi yang mandiri dan tidak mendapatkan dana dari sponsor kegiatan. Hal tersebut tercermin dari bagaimana

Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja menggali sumber dana dari iuran anggota dengan istilah lokal *kalengan* atau *pithian*. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan Muslimat NU di tingkatan masing-masing, ataupun juga disetorkan dari ranting ke anak cabang, dari anak cabang ke tingkat cabang. Bahkan tidak jarang mereka dapat menyumbang program kegiatan di luar Muslimat, seperti membantu pembangunan Mushola, pembangunan Gedung NU, gedung Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, dan sebagainya.

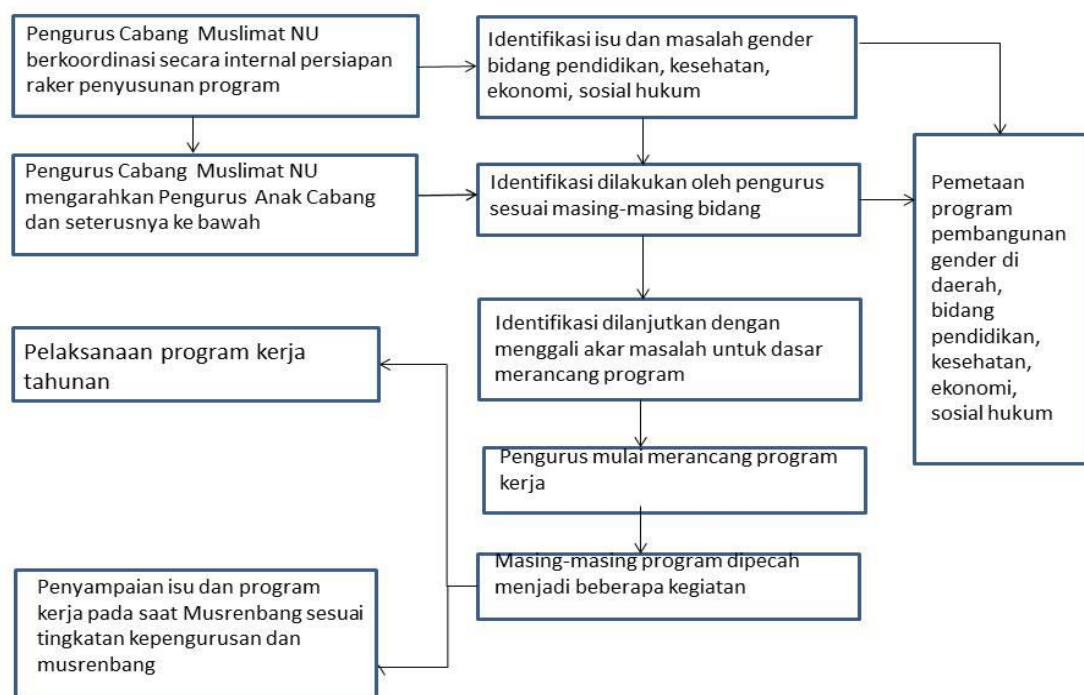
Hal lain yang dilakukan untuk mengumpulkan dana misalnya dengan menjual berbagai atribut Muslimat NU, seperti kalender, baju seragam Muslimat, jilbab, syal, bahan makanan, sembako, dalam pameran atau bazar yang diselenggarakan secara internal ataupun eksternal. Selain bersumber dari metode *kalengan* atau *pithian*, dana Muslimat NU Banyumas juga bersumber dari pengelolaan PAUD dan TK Diponegoro. Dari 23 TK Diponegoro yang dikelola Muslimat NU Banyumas, hampir semua tanah yang digunakan untuk TK tersebut adalah wakaf walaupun masih atas nama pemilik tanah yang memberikan wakaf tersebut. Uraian di atas menunjukkan komitmen tinggi masing-masing pengurus dan anggota untuk membesarkan Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja dengan caranya masing-masing, dengan cara menyumbang uang, pemikiran, tenaga, makanan, barang, tanah, dan sebagainya. Semua itu dilakukan dengan nilai dasar keikhlasan demi kemajuan kehidupan perempuan, yang juga bermanfaat bagi keluarga, agama, masyarakat dan bangsa.

### **Model Penyusunan Program Kerja Muslimat NU Berlandaskan Persoalan Gender Di Daerah**

Selanjutnya dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja tersebut, sesungguhnya Muslimat NU Kabupaten Banyumas memiliki potensi untuk bersama-sama Pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Dinas Perekonomian dan Koperasi untuk meningkatkan capaian pembangunan gender. Di tengah potensi sumber daya dan program kerja Muslimat NU, konsistensi dan keikhlasan perempuan Muslimat NU memajukan kaum perempuan dan organisasi dapat disinkronisasikan untuk mendukung capaian pembangunan gender di daerah. Dengan kata lain, terdapat potensi untuk melakukan keselarasan program kerja Muslimat NU di Kabupaten Banyumas untuk mendukung capaian pembangunan gender. Hal tersebut mengingat bahwa sampai saat ini

Kabupaten Banyumas masih mengalami masalah ketidaksetaraan gender dalam pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan IPG dan IDG Kabupaten Banyumas yang berada di bawah angka IPG dan IDG dan provinsi dan nasional.

Dengan asumsi tersebut, tulisan ini menyusun model yang penyusunan program kerja Muslimat NU di Kabupaten Banyumas yang selaras dengan masalah dan kebijakan pembangunan gender di daerah. Model program kerja Muslimat NU tersebut dijelaskan sebagai berikut:



**Gambar. 1. Model Program Kerja Muslimat NU Berbasis Isu dan Kebijakan Pembangunan Gender di Daerah**

Penjabaran mengenai model program kerja kegiatan Muslimat NU terhadap pembangunan gender di Kabupaten Banyumas dijabarkan sebagai berikut :

1. Identifikasi isu dan permasalahan gender daerah terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial hukum, oleh bidang-bidang yang ada dalam struktur Muslimat daerah. Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja memiliki bidang sebagai berikut; a) Organisasi dan Keanggotaan; b) Pendidikan dan Kaderisasi;

- c) Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup; d) Kesehatan; e) Dakwah; f) Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis; g) Tenaga Kerja; h) Hukum dan Advokasi.
2. Identifikasi juga menyesuaikan dengan cakupan kerja dan sumber daya pendukung masing-masing tingkatan kepengurusan. Seperti diketahui di bawah masing-masing kepengurusan cabang terdapat tingkat anak cabang, ranting, dan anak ranting.
  3. Setelah masalah teridentifikasi oleh-oleh masing-masing tingkat kepengurusan, maka masing-masing masalah digali lagi akar masalahnya. Dalam hal ini terutama persoalan-persoalan ketidakadilan gender yang lebih banyak menimpa perempuan dan anak.
  4. Pada saat yang sama, pengurus Muslimat sudah menginventarisir program kebijakan pembangunan gender di tingkat kabupaten, untuk menjadi perbandingan dan rujukan dalam membuat skala prioritas dalam menyusun program kegiatan.
  5. Selanjutnya pada masing-masing tingkatan kepengurusan dan bidang, mulai menyusun program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah ketidakadilan gender tersebut.
  6. Masing-masing pengurus di tingkatan masing-masing juga berusaha menyampaikan permasalahan utama yang penting disampaikan pada saat Musrenbang sesuai tingkatan masing-masing.

Model hilirisasi program kerja Muslimat NU terhadap kebijakan pembangunan gender di daerah tersebut telah dicoba untuk diterapkan kepada Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja. Masing-masing kegiatan dilakukan dalam bentuk workshop yang bertajuk *Workshop Mekanisme Penyusunan Program Kerja Muslimat NU Berbasis Kebutuhan Perempuan dan Program Pemerintah Daerah*. Dalam kegiatan workshop tersebut, peserta diberikan instrumen berupa mekanisme penyusunan kegiatan Muslimat NU berbasis kebutuhan perempuan dan program pembangunan gender daerah untuk di isi sesuai pengetahuan masing-masing. Instrumen dibuat dalam bentuk bagan, dengan dibagi dalam empat bidang besar pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial-hukum. Pembagian bidang tersebut juga mengacu pada bidang-bidang organisasi dalam struktur Muslimat NU daerah.

Hasil dari identifikasi penyusunan program tersebut kemudian dipresentasikan dan didiskusikan dalam forum workshop. Diharapkan dari kegiatan tersebut para pengurus cabang dapat mempraktekkan mekanisme penyusunan program kegiatan yang berbasis kebutuhan perempuan dan program pembangunan gender di daerah. Selanjutnya

diharapkan mereka dapat memberikan arahan dan masukan pada pengurus Muslimat NU di tingkat anak cabang, ranting, dan anak ranting. Beberapa hasil dari penerapan upaya penyusunan program kegiatan Muslimat NU oleh pengurus cabang Muslimat NU disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Contoh Penerapan Program Kerja Muslimat NU Kabupaten Banyumas**  
**Berbasis Isu dan Kebijakan Pembangunan Gender Pemerintah Daerah**

No	Bidang	Fenomena	Akar Masalah	Program Pengembang-an	Kegiatan	Program Pemkab	Sinergi Kegiatan Muslimat dengan Program Pemda
1	Pendidikan	Belum 100% perempuan melek huruf	Kesempatan pendidikan belum merata	Peningkatan baca tulis bagi ibu-ibu pedesaan	Kursus baca tulis	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal, penguatan lembaga kursus dan kelembagaan Pendidikan an pendidikan aksara.	V
					Pemberian motivasi		V
					Kesempatan pendidikan non formal		V
					Mendorong ikut Kejar Paket A B C		V
2	Kesehatan	Angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahirkan dan bayi	Pernikahan dini	Peningkatan kesadaran kesehatan ibu hamil dan melahirkan	Penyuluhan Bina remaja di PKK dan Dasawisma	Program pengawasan obat dan makanan ; Program perbaikan gizi masyarakat; Program peningkatan kesehatan lansia; Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	V
			Jarak kehamilan terlalu dekat		Penyuluhan tentang KB		V
			Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan dan kebersihan		Penyuluhan tentang kebersihan rumah dan lingkungan		V
3	Ekonomi-ketenaga kerjaan	Angka partisipasi kerja perempuan belum meningkat	Kurangnya kemampuan ketrampilan perempuan	Peningkatan kemampuan perempuan untuk usaha	Kursus ketrampilan	Program penciptaan usaha kecil menengah yang kondusif; Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; Program peningkatan kualitas koperasi	V
			Pengusaha kecil perempuan berdiri sendiri		Penyuluhan tentang kelompok usaha bersama		V
			Kurangnya modal perempuan pengusaha kecil		Penyuluhan tentang koperasi		V
			Kurangnya modal pengembangan usaha		Pelatihan pengelolaan usaha		V

4	Sosial Hukum	Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurangnya pemahaman hak-hak dasar perempuan dan anak	Peningkatan pemahaman hak-hak dasar perempuan dan anak	Pelatihan pendampin- gan korban kekerasan	Program pemberdaya- an fakir miskin dan penyangang masalah kesejahteraan sosial; Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;	V
			Keluarga yang tidak harmonis		Penyuluhan keluarga sakinah mawadah warohmah		V
			Praktik KDRT	Pendidikan pra-nikah	V		
			Pergaulan bebas	Penyuluhan pengasuhan anak	V		

Sumber : Laporan Kegiatan Muslimat NU Banyumas 2017; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018, Banyumas : Pemerintah Kabupaten, 2017; data primer, diolah

Selain melalui program kegiatan yang dijalankan, penguatan kontribusi perempuan dalam pembangunan gender di daerah juga dapat dilakukan melalui musrenbang. Musrenbang adalah Musyawarah Pembangunan Daerah yang diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Musyawarah perencanaan pembangunan dalam bentuk Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang bersifat partisipatif karena memungkinkan keterwakilan seluruh segmen masyarakat. Artinya, dalam mekanisme keterlibatan masyarakat tersebut, ormas perempuan termasuk dalam hal ini adalah Muslimat NU di daerah adalah menjadi bagian dari unsur masyarakat yang dapat terlibat dalam Musrenbang tersebut.

Sifat partisipatif dari Musrenbang juga memungkinkan kelompok-kelompok yang rentan termarginalkan dapat terlibat untuk mengusulkan agenda penting yang menyangkut kehidupan mereka. Dengan adanya mekanisme tersebut diharapkan kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah dapat mengintegrasikan isu gender dan kepentingan kelompok-kelompok marginal lainnya. Bahkan keterlibatan kelompok perempuan dalam Musrenbang diatur minimal sebanyak 30% dari keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan pada saat Musrenbang. Seperti diketahui Musrenbang di tingkat daerah mencakup Musrenbang kabupaten, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang desa. Penyelenggaraan Musrenbang pada umumnya dilaksanakan pada bulan Januari setiap awal tahun. Dengan demikian,



masing-masing kepengurusan Muslimat NU, mulai dari dari pengurus cabang, pengurus anak cabang, dan pengurus ranting dapat menyampaikan isu gender melalui partisipasi mereka dalam musrenbang sesuai tingkatan masing-masing.

### **Strategi Implementasi Program Kerja Muslimat NU yang Berlandaskan Kebijakan Pembangunan Gender di Daerah**

Dalam hal implementasi model penyusunan program kerja Muslimat NU berbasis kebijakan pembangunan gender di daerah, memang bukan hal yang tampak mudah untuk dilakukan. Hal tersebut diakui oleh Ketua Muslimat NU Banyumas, Laily Manshur dan Ketua Muslimat NU Sokaraja, Ibu Muslimah. Penjelasan kedua ketua cabang tersebut bersifat senada bahwa perumusan kegiatan Muslimat NU pada prinsipnya mengikuti program kegiatan yang sudah ditentukan oleh Pengurus Pusat Muslimat NU yang dirancang selama lima tahun. Selama lima tahun kepengurusan mengikuti program kegiatan tersebut dan kurang ada perubahan atau improvisasi untuk menyesuaikan program kegiatan dengan perkembangan masalah sosial ekonomi dan lainnya yang sedang menjadi perhatian utama masyarakat. Kondisi demikian sudah menjadi kebiasaan lama yang terjadi dalam setiap kepengurusan Muslimat NU dari periode-periode.

Namun kedua ketua pengurus cabang tersebut juga mengakui bahwa penting untuk membuat sinkronisasi program kegiatan Muslimat mengikuti perkembangan masalah sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat. Apalagi dalam kurun waktu 5 tahun, isu dan permasalahan dalam masyarakat tentu saja terus berkembang dengan pesat. Sesungguhnya bila program kerja tersebut disusun untuk jangka waktu satu tahun, lebih dimungkinkan untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dan isu masalah yang lebih up date.

Hal yang menjadi dilemma seperti diakui oleh ketua pengurus cabang tersebut adalah apabila ada perombakan mengenai tata kelola Muslimat secara lebih professional, didukung oleh target kegiatan yang ditentukan secara tegas, maka kendalanya adalah tidak adanya gaji bagi para pengurus Muslimat NU, baik di tingkat cabang, anak cabang sampai ranting. Dengan demikian, strategi yang implementasi yang dikemukakan berikut ini lebih bersifat dorongan dengan memanfaatkan kekuatan atau potensi yang sesungguhnya sudah dimiliki oleh Muslimat NU di daerah. Berikut ini disampaikan beberapa strategi dalam implementasi model penyusunan program kerja Muslimat NU yang berbasis isu dan kebijakan pembangunan gender di Banyumas:

1. Pemahaman mengenai perkembangan masalah sosial ekonomi yang ada di sekitar dimulai dengan kepekaan mengidentifikasi isu gender dan membuat catatan-catatan tentang fenomena sosial ekonomi yang ada di sekitar keluarga, RT, RW, desa atau kelurahan, atau lingkup yang lebih besar.
2. Memanfaatkan akses para pengurus Muslimat NU terhadap media massa dan internet untuk menangkap isu dan permasalahan yang lebih up date di masyarakat.
3. Keikutsertaan pengurus cabang dan anak cabang dalam kegiatan-kegiatan SKPD Pemerintah Kabupaten agar lebih mendalam memahami program kerja SKPD.
4. Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk lebih menguatkan jaringan Muslimat NU dengan SKPD pemerintah daerah sehingga dapat memahami program kegiatan yang menjadi perhatian utama SKPD saat ini.
5. Pengurus cabang dan anak cabang Muslimat NU dapat lebih memahami informasi di website *banyumaskab.go.id*, khususnya yang berkaitan dengan program kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan kegiatan-kegiatan lainnya.
6. Menguatkan keikutsertaan pengurus dan anggota Muslimat NU dalam Musrenbang sesuai dengan masing-masing tingkatannya dan dalam partisipasi tersebut, sebaiknya pengurus sudah memiliki draf isu-isu permasalahan paling urgen apa yang perlu disampaikan dalam forum tersebut.
7. Pendampingan tenaga ahli secara lebih intensif untuk merumuskan atau mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan Muslimat NU.
8. Program kegiatan walaupun sudah ada rambu-rambu dari pengurus pusat, secara substansial atau materi kegiatan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan isu sosial dan ekonomi yang berkembang.
9. Mendorong pengurus anak cabang dan pengurus ranting untuk mengikuti pola kerja yang dilakukan oleh pengurus cabang Muslimat NU kabupaten.
10. Memanfaatkan jaringan-jaringan yang selama ini sudah terbentuk di kalangan Muslimat NU di daerah, seperti dengan ormas-ormas lain seperti GOW, Aisyiah, PKK, perguruan tinggi, media massa dan sebagainya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menghasilkan model penyusunan program kerja Muslimat NU yang selaras dengan isu dan kebijakan pembangunan gender di daerah, didasarkan pada

upaya identifikasi terhadap masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial hukum yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan kepengurusan. Dengan adanya model tersebut diharapkan program kerja Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja dapat berjalan beriringan dan mendukung kebijakan pembangunan gender di daerah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada DRPM Kemenristekdikti yang mendanai penelitian ini melalui Penelitian Strategis Nasional Tahun 2018. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPPM Universitas Jenderal Soedirman yang telah mengkoordinasikan, mengelola, dan mendukung sepenuhnya terlaksananya penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Handayani Trisakti, dan Sugiarti, 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang UMM Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2017. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*, Jakarta.
- Laporan Kegiatan Muslimat NU Banyumas Tahun 2017*, Purwokerto : Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas.
- PP Muslimat NU, 1979. *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, Jakarta : PP Muslimat NU.
- Punch, Keith, 2006. *Developing Effective Research Proposal*, London: Sage Publication.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018*, Banyumas : Pemerintah Kabupaten, 2017.
- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte, 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Kalyanamitra : Jakarta.